

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Definisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi sejahtera baik secara material, spiritual dan kehidupan sosial yang dimiliki individu ataupun masyarakat agar dapat mampu memenuhi kebutuhannya seperti jasmani, Rohani, serta sosial tanpa melakukan penyimpangan sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 yang di kutip dalam Fahrudin (Fahrudin, 2018:10) bahwa

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Definisi di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial yaitu kondisi dimana warga negara dapat hidup dengan layak seperti berada di lingkungan yang bersih nyaman, bebas dari sampah sehingga masyarakat mendapatkan ketenangan Kesehatan dikarenakan lingkungan yang bersih, selain itu juga dapat memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial mereka. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan utama Pembangunan sosial yang harus dicapai oleh pemerintah dan masyarakat. Kesejahteraan sosial yang baik dapat membantu individu dan kelompok dalam mengembangkan diri dan melaksanakan fungsi sosialnya dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan material meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu sandang, pangan, dan papan, hal tersebut merupakan kebutuhan pokok setiap manusia.

Selanjutnya kebutuhan spiritual meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu religi, filsafat dan seni yang dapat membantu manusia dalam mencari arti dan tujuan dalam hidupnya. Sedangkan kebutuhan sosial meliputi hal-hal sebagai berikut seperti komunikasi, interaksi sosial, dan perlindungan yang dapat membantu manusia dalam mengembangkan hubungan sosial yang sangat baik.

Pengertian kesejahteraan sosial menurut Friedlander yang di kutip Fahrudin (Fahrudin, 2018:9) yaitu

Social welfare is the organized sistem of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationship that permit them to develop their full capaties and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community.

Kesejahteraan sosial adalah si stem terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-intitusi yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan Kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan spenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu system yang terorganisir dan dirancang untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai standar hidup yang memadai seperti berada di lingkungan yang layak bebas dari sampah sehingga memberikan kenyamanan dan Kesehatan yang baik. System ini juga memungkinkan individu dan kelompok untuk mengembangkan kapasitas dan hubungan sosial yang baik, yang dapat membantu mereka untuk memenuhi kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Kesejahteraan sosial merupakan keseluruhan sari fasilitas yang diyujukan untuk meningkatkan kualitas hidup individu atau masyarakat dam mengurangi ketimpangan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang lahir untuk memecahkan suatu permasalahan sosial yang di alami individu, kelompok, dan masyarakat. Sebagai suatu disiplin ilmu, Ilmu kesejahteraan sosial terus mengembangkan pemikiran dan teknik strategis dalam meningkatkan kondisi kesejahteraan. Adapun kesejahteraan sosial menurut Fahrudin dalam bukunya (Fahrudin, 2018:17) yaitu :

Kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mngembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain memalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

Definisi diatas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu ilmu yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kulaitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Seperti pengelolaan masalha sosial, pemenuhan suatu kebutuhan masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat agar dapat berkembang.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu terapan yang memiliki berbagai tujuan agar dapt digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat, selain itu juga adapun tujuan dari kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (Fahrudin, 2018:10) yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, Kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkunganya.

2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan mengali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Definisi di atas menjelaskan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu untuk membantu masyarakat dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dengan tercapainya kebutuhan kehidupan pokok mereka seperti sandang, perumahan, pangan, Kesehatan, dan relasi-relasi yang menjadi kebutuhan dasarnya, dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf yang memuaskan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk mengembalikan keberfungsian sosial yang baik bagi individu, kelompok dan masyarakat agar dapat berperan dan menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam lingkungan sosialnya. Selain itu juga menurut Fahrudin (Fahrudin, 2018:12) dalam bukunya menjelaskan bahwa fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yaitu fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan, dan fungsi penunjang sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta Lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi Kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Definisi di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan, serta fungsi penunjang. Fungsi pencegahan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu masalah sosial sebelum masalah tersebut muncul dalam masyarakat. Fungsi penyembuhan dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi suatu masalah sosial yang ada di masyarakat yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat itu sendiri. Fungsi pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan peningkatan masyarakat agar lebih berdaya melalui pemberdayaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya fungsi penunjang bertujuan untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan bidang-bidang kesejahteraan sosial lainnya.

2.1 Konsep Pekerja Sosial

2.2.1 Definisi Pekerja Sosial

Pekerja sosial merupakan profesi yang memberikan bantuan ataupun pertolongan berupa pelayanan pada individu, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat tersebut dapat kembali keberfungsian sosialnya, hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan *International Federation of Social Worker/IFSW* yang dikutip di dalam buku *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial* (Huda, 2009:3) yaitu:

Pekerjaan sosial (*Social Work*) adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Definisi diatas menjelaskan bahwa pekerja sosial adalah profesi yang mendorong perubahan sosial menjadi lebih baik, membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat, dan membantu masyarakat menjadi berdaya agar dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera.

Dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik di mana orang berintraksi dengan lingkungannya. Selain itu juga dalam definisi lain dalam buku Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial (Huda, 2009:3) yaitu:

Pekerja sosial merupakan sebuah aktifitas profesional dalam menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi-kondisi mereka agar berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya.

Definisi diatas menjelaskan bahwa pekerja sosial merupakan sebuah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi mereka agar dapat lebih baik dari sebelumnya selain itu juga untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat agar lebih kondusif dan dapat mencapai tujuannya. Pekerja sosial pun bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial individu, keluarga dan masyarakat. Keberfungsian sosial merupakan kemampuan seseorang atau kelompok dapat memenuhi kebutuhannya, sebagaimana telah di sebut oleh Suharto (2009) keberfungsiaan sosial adalah kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat) dan sistem sosial (Lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi kebutuhan dasar,

menjalankan peranan sosialnya, dan juga menghadapi goncangan dan tekanan (shock and stress) (Mujahiddin, 2022).

2.2.2 Tujuan Pekerja Sosial

Kesejahteraan sosial selain merupakan suatu ilmu dibidang sosial yang sangat erat kaitanya dengan kehidupan bermasyarakat dan juga keberfungsian sosialnya, selain itu juga tujuan pekerja sosial yang sudah di tegaskan oleh *The National Association of Social Workers* (NASW) pekerjaan sosial mempunyai empat tujuan utama, namun belakangan *The Concil on Social Work Education* menambah dua tujuan pekerjaan sosial sehingga menjadi enam point penting hal tersebut sesuai dengan yang di kutip Huda yaitu:

1. Peningkatan kapasitas penduduk dalam memecahkan masalah dapat membantu memperkuat fungsi sosialnya, ketika seseorang mengalami kesulitan, seringkali ia tidak mempunyai keyakinan bahwa ia mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, tugas pekerja sosial adalah mengidentifikasi kebutuhan klien dan memberikan rekomendasi agar mereka dapat mengubah cara hidupnya.
2. Penghubungkan klien ke sumber jaringan yang diperlukan, dalam hal ini, pekerjaan sosial berfungsi secara strategis dalam advokasi sosial serta menghubungkan klien dengan sumber daya yang dibutuhkan setiap klien untuk tumbuh dan mencapai tujuan hidupnya. Menjadi broker sosial, atau pialang sosial, adalah pendekatan strategis yang mungkin digunakan pekerja sosial untuk mencapai tujuan ini.

3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial agar berjalan secara efektif. Pekerja sosial bekerja keras untuk memastikan bahwa organisasi sosial dapat memberikan layanan yang adil dan efisien kepada klien atau masyarakat. Hal ini dilakukan karena lembaga-lembaga sosial dipandang sebagai salah satu alat utama untuk mencapai tujuan-tujuan dari disiplin ilmu pekerja sosial. Peran-peran yang dapat dilakukan pekerja sosial antara lain, penganalisis program, supervisor, koordinator ataupun konsultan.
4. Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak. Pekerjaan sosial memiliki hubungan yang kuat dengan keadilan sosial, lebih dari hubungan antarpribadi. Tujuan pertama dan juga tujuan akhir adalah satu-satunya alat yang tersisa untuk mencapainya. Keduanya berada dalam wilayah kajian pekerjaan sosial. Pekerja sosial dapat berperan sebagai perencana (*planner*) atau pengembang kebijakan (*policy developer*).
5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi, kelompok rentan yang dimaksud yaitu orang lanjut usia, kaum Perempuan, gay, lesbian, orang cacat fisik maupun mental, pengidap HIV/AIDS, dan kelompok marjinal lainnya, biasanya kelompok rentan tersebut sering terabaikan hak-hak keadilan sehingga perlu dilindungi.
6. Memajukan dan melaksanakan uji keterampilan atau pengetahuan profesional. Pekerjaan sosial diharapkan memiliki dasar-dasar keterampilan dan pengetahuan yang mencukupi dalam praktiknya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas uji kelayakan terhadap pekerjaan sosial itu sendiri perlu dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar praktik pekerjaan sosial yang

dilakukan tidak membedakan dan sejalan dengan norma dan etika yang dianut masyarakat (Huda, 2009:15).

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pekerja sosial memiliki tujuan penting sesuai dengan yang disebutkan oleh NASW dan *The Concil on Social Work Education* menjelaskan bahwa pekerja sosial harus dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya, Ketika seseorang atau masyarakat sedang memiliki masalah pekerja sosial berperan dalam mengidentifikasi kekuatan klien dan menyadari bahwa klien memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga dapat mendorong, klien atau masyarakat untuk melakukan perubahan pada kehidupannya. Pekerja sosial juga harus dapat menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan, dalam hal ini pekerja sosial berfungsi strategis dalam advokasi sosial dengan menghubungkan dengan jaringan-jaringan sumber yang di butuhkan seorang klien atau masyarakat untuk dapat berkembang dan mencapai tujuan kehidupannya.

Pekerja sosial harus dapat menjamin agar lembaga-lembaga sosial dapat memberikan pelayanan kepada klien atau masyarakat secara merata atau efektif. Pekerja sosial harus dapat mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak. Pekerja sosial harus dapat memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Contohnya seperti orang lanjut usia, gay, kaum Perempuan, orang yang cacat fisik maupun mental, seorang pekerja sosial berperan penting

untuk mereka agar mereka mendapatkan hak-hak dan keadilan yang harus didapatkan.

2.2.3 Nilai dan Etika Pekerja Sosial

2.2.3.1 Nilai-nilai Pekerja Sosial

Dalam mengembangkan berbagai layanan sosial pada masyarakat para pekerja sosial mempunyai berbagai nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dalam melakukan praktik perubahan sosial terencana menurut Zastrow (2010) terdapat tiga komponen dasar yang harus di pertimbangkan dan dielaborasi dalam mengembangkan profesi praktisi di bidang pekerjaan sosial yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Menurut pendapat Kahn (1969) pengetahuan (*knowledge*) merupakan pemahaman teoritis ataupun praktis yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan; belajar dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktik serta pengembangan keterampilan yang harus dimiliki. Untuk melihat apakah suatu knowledge itu benar atau salah, cara untuk membuktikannya adalah kajian berdasarkan kajian terhadap dunia empirik melalui cara pengkajian ilmiah.

2. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan merupakan hal yang sangat penting dalam profesi pemberi bantuan (*helping profession*) dan menjadi prasyarat bila profesi tersebut ingin berkembang. Keterampilan didefinisikan sebagai kemampuan, keahlian atau kemahiran yang diperoleh dari praktik dan pengetahuan, keterampilan tidak muncul dari proses uji coba belaka, akan tetapi keterampilan muncul karena ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh seseorang, oleh

sebab itu, semakin seseorang mempelajari pengetahuan yang terkait dengan praktik yang ia hadapi sehari-hari, maka semakin miskin pula variasi alternatif penanganan masalah yang akan ia berikan.

Keterampilan merupakan nilai penting bagi seorang pekerja sosial di karenakan Ketika menangani kasus sosial kita seseorang harus memiliki keterampilan di bidang tersebut, keterampilan juga lahir dari diperolehnya pengetahuan yang menyebabkan seseorang itu lahir di bidang tersebut.

3. Nilai (*Value*)

Pincus dan Minaha (1973:38) menyatakan bahwa nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang di inginkan atau dianggap baik oleh manusia (*Values an beliefs, preferences or assumptions about what is desirable or good for humans*). Nilai yang dianut oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain (Adi, 2015:77).

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh seseorang sesuai dengan keyakinan ataupun asumsi seseorang tersebut, nilai juga dapat menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam berintraksi.

2.2.3.2 Etika Pekerja Sosial

Dalam perkembangan ilmu kesejahteraan sosial, prinsip dasar yang diadopsi masih sangat terikat dengan prinsip pekerja sosial, menurut Henry Maas (1977) prinsip-prinsip dasar pekerja sosial yaitu:

1. Penerimaan (*Acceptance*)

Prinsip ini dengan jelas menyatakan bahwa praktisi harus selalu berusaha memenuhi kebutuhan kliennya tanpa “menghakimi” mereka. Kemampuan praktisi untuk menerima kliennya dengan sewajarnya akan dapat membantu perkembangan relasi antara mereka.

Misalnya ketika seorang klien yang berpakaian lusuh datang mengeluhkan bahwa ia mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar uang jaminan dan meminta pinjaman dari lembaga sosial tempat ia menginap untuk memberikan pinjaman tersebut. Praktisi tidak boleh menghakimi tetapi memberikan solusi agar klien tersebut dapat menemukan jalan keluarnya.

2. Komunikasi (*communication*)

Prinsip komunikasi ini erat kaitannya dengan kemampuan praktisi dalam menangkap informasi dan pesan yang diungkapkan klien. Pesan-pesan yang disampaikan klien dapat berupa pesan verbal yang diungkapkan klien melalui kata-kata. Alternatifnya, pesan tersebut dapat berupa pesan non-verbal. Misalnya cara klien duduk, cara menggerakkan tangannya, dan cara meletakkan tangannya. Pesan nonverbal ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi apakah klien merasa cemas, gelisah, takut gembira, bahagia, dan ungkapan perasaan lainnya.

3. Individualisasi (*individualisation*)

Prinsip individualisasi berasumsi bahwa setiap orang unik, sehingga seorang praktisi harus berusaha memahami sifat unik setiap klien. Akibatnya,

mereka harus berusaha mengembangkan intervensi yang paling sesuai dengan kondisi klien mereka untuk mencapai hasil terbaik.

Dengan prinsip individualisasi ini, diharapkan bahwa praktik tidak menyamakan setiap klien. Akibatnya, sehingga pendekatan terapi lebih fokus pada penanganan setiap kasus dari pada menggeneralisasi cara menangani masalah.

4. Partisipasi (*Participation*)

Pada dasarnya, praktisi didorong untuk bertindak sebagai fasilitator. Dalam peran ini, praktisi diharapkan mendorong kliennya untuk berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tanpa partisipasi aktif dari klien, tujuan terapi tidak dapat dicapai. Misalnya, jika seorang praktisi menangani orang tua yang menderita depresi akibat kematian anak kesayangannya, upayanya tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan jika klien tidak aktif dan tidak menunjukkan keinginan untuk mengatasinya.

Dalam ilustrasi singkat ini, jelas bahwa klien memainkan peran yang sangat penting dalam proses "kesembuhannya" sendiri. Berbagai rekomendasi yang diberikan oleh aktivis kesejahteraan sosial tidak akan berguna jika klien tidak terlibat.

5. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Dalam hal ini, praktisi harus menjaga rahasia dari kasus yang dia tangani. Untuk menghindari pembicaraan mengenai kasus tersebut dengan orang-orang yang tidak terlibat dalam penanganan kasus tersebut. Ketika kasus tersebut

dibahas dalam suatu tim kerja, praktisi baru dapat memahaminya. Misalnya saja, seorang sarjana Kesejahteraan Sosial yang bekerja pada unit Psikiatri Rumah Sakit B, baru dapat membicarakan kasus yang ia tangani ketika memahaminya bersama tim kerjanya yang terdiri dari psikolog dan psikiater.

Dengan menjaga kerahasiaan ini, klien dapat lebih bebas mengungkapkan masalahnya atau perasaannya. Dia juga akan merasa lebih aman untuk mengungkapkan perasaannya karena dia yakin bahwa apa yang dia katakan kepada praktisi ini akan terjaga rahasianya.

6. Kesadaran diri petugas (*worker self-awareness*)

Menurut prinsip kesadaran diri (*self-awareness*), seorang praktisi harus bertindak profesional saat menjalin hubungan dengan kliennya. Praktisi harus mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terpengaruh oleh perasaan atau masalah yang dihadapi kliennya. Praktisi harus tetap rasional tetapi mampu menyelami perasaan kliennya secara objektif. Dengan kata lain, praktisi harus menggunakan empati saat menjalin hubungan dengan kliennya (Adi, 2015:84)

2.2.4 Metode Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang bertujuan membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengembalikan keberfungsiaan sosialnya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Dalam menjalankan proses praktik pertolongannya, seorang pekerja sosial menggunakan beberapa metode sesuai dengan masalah yang harus di pecahkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan

sosialnya. Menurut Miftachul Huda dalam buku pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial terdapat tiga level yaitu:

Pekerjaan sosial terbagi menjadi tiga level, *mikro* (individu), *mezzo* (keluarga dan kelompok kecil), dan *makro* (organisasi atau masyarakat). Dalam masing-masing garapan tersebut pekerjaan sosial memiliki metode yang berbeda dalam menanganinya yaitu di level *mikro* dikenal *casework* (terapi perseorangan/ terapi klinis); *group work* (terapi kelompok) dan *family therapy* (terapi keluarga) dalam level *mezzo*; dan *community development* (pengembangan masyarakat) atau *policy analysis* (analisis kebijakan) pada level *makro* (Huda, 2009:18).

Definisi diatas menjelaskan bahwa terdapat 3 level metode pokok dalam penanganan pekerjaan sosial sesuai dengan kasus yang dihadapi seperti penanganan individu menggunakan metode *mikro* dikenal juga *casework*, menangani kelompok kecil dan keluarga menggunakan *mezzo* dikenal juga *group work*, dan pengembangan masyarakat menggunakan metode *makro community organization/community development (COCD)*.

2.2.5 Pekerja Sosial Sebagai Profesi

Pekerjaan sosial merupakan sebuah disiplin ilmu yang mandiri sehingga aktifitas pekerjaan sosial dapat disebut sebagai profesi. Pekerjaan sosial memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Meskipun perspektif kekuatan menganggap klien sebagai pihak yang kuat dan memiliki potensi dalam proses penyembuhan, profesi lain, seperti dokter, psikiater dalam konteks klinis, ekonom, politikus, dan pengacara dalam konteks makro (kebijakan dan hukum), juga perlu bekerja sama. Namun, kolaborasi yang dibutuhkan pekerja sosial ini secara bersamaan dapat menimbulkan keraguan tentang pekerjaan profesi sosial. Akan tetapi Abraham Flexner, seorang reformis dalam bidang Pendidikan medis yang juga dikenal sebagai observer profesi pekerjaan sosial mempresentasikan sebuah

makalah yang kontroversial dalam *National Conferensi on charities and correction* pada 1915. Makalah tersebut berjudul, “*Is Social Work a Profession?*”. Pertanyaan tersebut mungkin wajar muncul dari Abraham, sebab masa ini di kenal dengan masa-masa awal perkembangan pekerjaan sosial.

Setelah itu, Flexner sampai pada kesimpulan yang menarik bahwa pekerjaan sosial belum dapat dianggap sebagai sebuah profesi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pekerjaan sosial tidak memiliki garis demarkasi yang tegas dengan profesi lainnya. Misalnya, bidang medis, psikologi, hukum, pendidikan, bahkan arsitektur juga termasuk dalam kategori pekerjaan sosial. Ini sangat berbeda dengan profesi lain, seperti dokter, guru, atau pengacara, yang hanya fokus pada pekerjaan mereka. Suatu pekerjaan harus jelas dan mencapai tujuan tertentu.

Kesimpulan dari Flexner ini memang dapat dipahami, sebab kolaborasi dari profesi lain memang dilakukan oleh pekerja sosial sebab sangat dibutuhkan dalam proses penyembuhan terhadap klien. Ketika pekerja sosial menghadapi seorang klien yang sedang mengalami trauma berat, misalnya korban bencana alam, bagaimana pun sangat dianjurkan untuk merujuk klien kepada psikolog atau profesi lain yang lebih ahli untuk membantu klien dalam proses penyembuhannya. Akan tetapi sangat disayangkan, kebutuhan akan adanya kolaborasi itu justru melahirkan keraguan tentang profesionalisme pekerjaan sosial sebagaimana dalam pandangan Flexner.

Menurut Flexner menetapkan batasan yang ketat untuk apa yang dianggap profesional atau profesi. Menurutnya, seorang profesional harus memenuhi enam

kriteria minimal hal tersebut ada dalam buku pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial yaitu:

Pertama, suatu profesi harus mencakup esensi intelektualitas dengan tanggung jawab individu yang besar. Kedua, "bahan baku" keilmuannya berasal dari ilmu pengetahuan dan pembelajaran, bagaimana pun suatu profesi harus dilandasi oleh aktivitas intelektual yang berasal dari pengalaman dan pembelajaran ilmiah. Ketiga, "bahan baku" ini menghasilkan praktik dan tujuan akhir yang jelas. Keempat, memiliki metode yang dapat diajarkan. Kelima, mereka mungkin lebih mampu mengorganisasikan diri mereka sendiri. Keenam, Anda akan lebih termotivasi untuk membantu orang lain daripada melakukan pekerjaan yang dianggap "mata duitan"(Huda, 2009, p. 21).

Dalam penjelasan Flexner di atas, dapat disimpulkan bahwa, meskipun pekerjaan sosial pada saat itu belum dapat dianggap sebagai sebuah profesi, pekerjaan sosial sudah memiliki ciri-ciri di atas sehingga pekerjaan sosial pada masa kini sudah dapat dikategorikan menjadi sebuah profesi yang profesional. Misalnya, pekerjaan sosial diakui sebagai suatu aktivitas sosial yang terdidik, berlandaskan intelektualitas dan ilmu pengetahuan.

Tahun 1957 Ernest Greenwood mengevaluasi kembali tentang pertanyaan seputar profesionalisme pekerjaan sosial didalam artikelnya yang berjudul "*Attributes of a Profession*" Greenwood menyebutkan pada masa itu pekerjaan sosial sudah layak di sebut sebagai profesi. Greenwood mengajukan beberapa kriteria profesionalisme, dan menurutnya pekerjaan sosial sudah memenuhi kriteria-kriteria tersebut, kriteria tersebut dikutip dalam buku pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial yaitu:

1. Adanya teori yang sistematis. Suatu profesi mempunyai pengetahuan yang fundamental dan mengembangkan teori secara sistematis yang digunakan sebagai dasar praktik.

2. Otoritas. Kredibilitas dan otoritas profesional dalam hubungannya dengan klien didasarkan kepada kompetensi dan keputusan yang profesional.
3. Peretujuan umum. Suatu profesi berarti berdaya, baik untuk mengatur maupun mengontrol anggotanya, praktik profesional, pendidikan dan standar penampilan.
4. Kode etik. Suatu profesi mempunyai pelaksanaan yang eksplisit, sistematis dan mengikat perilaku anggotanya dengan kode etik.
5. Adanya kultur. Suatu profesi di tuntun oleh budaya, norma dan simbol dengan jaringan yang terorganisir dari kelompok formal maupun informal melalui fungsi profesi dan pelayanannya (Huda, 2009:22).

Terdapat pandangan tokoh lain, seperti menurut Willian Wickenden mengajukan empat kriteria profesi yang dikutip dalam buku pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial diantaranya yaitu:

1. Tipe aktivitas yang ditandai dengan tanggung jawab individu yang besar.
2. Motif pelatanaan yang digerakkan oleh kesadaran moral dan bukan mengejar profit.
3. Motif ekspresi diri yang cerdas dan mengesankan.
4. Adanya kesadaran bahwa yang dilakukannya adalah sebagai kewajiban sosial.

Kualifikasi dari pekerja sosial profesional yang sudah tercantum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang kesejahteraan sosial pasal 33 ayat 2 adalah:

1. Pendidikan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial.

3. Pengalaman melaksanakan pelayanan sosial (Huda, 2009:23).

Pekerjaan sosial saat ini dapat dianggap sebagai pekerjaan profesional. Pekerjaan sosial menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang memiliki banyak masalah sosial. Sebab, sebagaimana fungsinya, pekerjaan sosial fokus pada membantu orang yang mengalami kesulitan untuk meningkatkan peran sosialnya. Misalnya, mereka yang menghadapi kesulitan mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena alasan tertentu.

Kabar menggembirakan juga bahwa di Indonesia, pekerja sosial telah menjadi pekerjaan yang dihormati akhir-akhir ini. Contohnya adalah Undang-undang Kesejahteraan Sosial yang disetujui oleh DPR RI pada tanggal 18 desember 2008. Ayat 4 Pasal 1 menyatakan bahwa “Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman melakukan pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.”

2.3 Konsep Pekerja Sosial Lingkungan

2.3.1 Definsi Pekerja Sosial Lingkungan

Pekerjaan sosial lingkungan (ESW) merupakan sebuah pendekatan dan perspektif dalam pekerjaan sosial yang berfokus pada keberlanjutan dan keadilan ekologi dalam konteks Pembangunan berkelanjutan. Pekerjaan sosial lingkungan juga dapat diartikan sebagai pendekatan dan perpektif dalam pekerjaan sosial

yang berfokus pada kelestarian dan keadilan ekologis dan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Rambaree, 2020)

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial lingkungan berfokus pada keadilan ekologi, kelestarian, lingkungan untuk mempelajari interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, agar dapat kita peduli dengan lingkungan sekitar kita untuk menciptakan Pembangunan berkelanjutan yang baik untuk generasi yang akan datang.

Iskandar menjelaskan bahwa pekerja sosial di era saat ini merupakan profesi yang sangat relevan dengan dinamika permasalahan sosial ekologi, yang dimana pekerja sosial tidak hanya berfokus pada penanganan masalah kesejahteraan sosial saja akan tetapi permasalahan lingkungan juga turut diperhatikan secara merata. satu kesatuan ekosistem sosial dan lingkungan merupakan bidang baru dalam praktik pekerjaan sosial profesional di Indonesia (Achmad, 2023).

Pendapat diatas menjelaskan bahwa pekerja sosial harus dapat fokus dengan permasalahan lingkungan bukan hanya penanganan masalah kesejahteraan sosial saja, dikarenakan hidup manusia akan selalu berdampingan dengan lingkungan, jika lingkungannya tidak baik, bisa jadi berdampak bagi kehidupan manusia, karena itu pentingnya peka terhadap kondisi lingkungan.

2.4 Konsep Masalah Sosial

2.4.1 Definisi Masalah Sosial

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi

bentrok antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang mempunyai berbagai dimensi. Karena, begitu banyaknya dimensi yang terkandung di dalamnya, mengakibatkan hal ini menjadi objek kajian, akan tetapi, meskipun gejala ini telah lama, sampai sekarang belum diperoleh rumusan pengertian yang di sepakati berbagai pihak. Dari sisi yang lain, ditemukan juga definisi yang justru mempertegas relativitas masalah sosial, meskipun gejalanya sudah berlangsung cukup lama, baru disebut sebagai masalah sosial apabila dinyatakan sebagai masalah oleh masyarakat (Soetomo, 2015:1-7).

Dipertegas juga oleh Weinberg mengenai definisi masalah sosial adalah masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat di butuhnya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut (Soetomo, 2015:7).

Dari definisi tersebut dapat diidentifikasi tiga unsur penting yaitu:

1. Suatu situasi yang dinyatakan
2. Warga masyarakat yang signifikan
3. Kebutuhan akan tindakan pemecahan masalah.

Dari unsur-unsur tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu gejala harus didefinisikan dan diidentifikasi sebagai masalah oleh masyarakat sebelum masyarakat dapat dinyatakan sebagai masalah sosial. Pernyataan sebagai masalah sosial dapat dilakukan secara simbolik atau langsung dalam kehidupan sosial. Masyarakat menanggapi suatu kondisi dengan penolakan. Hal ini dapat dianggap sebagai tanda bahwa masyarakat menganggap kondisi tersebut sebagai masalah

sosial. Disebabkan oleh referensi yang berbeda yang digunakan, masyarakat yang berbeda memiliki identitas dan definisi yang berbeda.

2.4.2 Klasifikasi Masalah Sosial

Ada beberapa faktor dari penyebab masalah-masalah sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, budaya, biologis dan psikologis, berikut penjelasannya:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi termasuk penyebab dari masalah sosial terbesar, karena individu atau kelompok perlu mencukupi kebutuhannya. Pemerintah perlu mengatasi kesenjangan ekonomi seperti distribusi dan juga produksi yang memengaruhi kesejahteraan dari masyarakat. Contoh faktor ekonomi yaitu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan juga pengangguran.

2. Faktor Budaya

Perbedaan kebudayaan dapat memicu pelanggaran norma, nilai dan juga kepentingan sosial masyarakat. Kebudayaan yang berbeda dapat menimbulkan permasalahan baru yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan bisa berkembang dan berperan dalam kehidupan masyarakat. Contoh sederhana dari faktor budaya, yaitu saling menghormati orang lain dan kepekaan akan lingkungan. Sedangkan hal negatif dari faktor budaya seperti tidak peduli pada lingkungan sekitar. Contoh faktor budaya yaitu kenakalan remaja, konflik antar suku, pernikahan dini, eksploitasi lingkungan, perceraian, diskriminasi dan masih banyak lagi.

3. Faktor Biologis

Faktor biologis disebabkan karena kondisi kesehatan masyarakat yang menimbulkan masalah sosial. Ada tiga kelompok penyakit menular yaitu penyakit yang berbahaya, angka kematian tinggi, penyakit menular yang menimbulkan kematian, dan penyakit menular yang menimbulkan kerugian materi dan kesehatan. Contoh faktor biologis seperti kurang gizi pada balita, virus Covid-19, makanan beracun, dan munculnya penyakit baru yang belum ada obatnya.

4. Faktor Psikologis

Faktor ini dipengaruhi oleh pola pikir individu dan masyarakat. Psikologis berhubungan dengan pemahaman dan sudut pandang seseorang tentang aliran sesat agama atau pemahaman yang tidak sesuai dengan ideologi. Faktor psikologi bisa ditangani dengan pendekatan bijak. Contoh faktor psikologis seperti, aliran agama yang menyimpang, gerakan anti pemerintah, dan penyimpangan seksual. Contoh faktor psikologis lainnya yaitu lingkungan sosial, orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, dan keyakinan agama yang berbeda (Budyanti, 2022:43).

Faktor tersebut merupakan suatu hal yang menyebabkan adanya permasalahan sosial faktor tersebut selalu ada dan terjadi karena termasuk dalam bagian hidup di masyarakat, dan dikatakan sebagai keadaan yang wajar karena merupakan suatu integrasi yang mempunyai hubungan saling mempengaruhi dalam masyarakat menjadi satu kesatuan sehingga setiap anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain.

2.4.3 Jenis-jenis masalah sosial

Masalah-masalah sosial yang hidup dalam masyarakat dapat diklasifikasi kedalam beberapa hal, yaitu:

1. Kemiskinan

Masalah kemiskinan bisa dipandang secara relatif oleh masing- masing orang, hal tersebut tergantung pada taraf kehidupan masyarakat setempat. Bagi masyarakat modern, miskin itu dipandang karena tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan hidupnya. Akan tetapi bagi masyarakat yang sederhana kemiskinan itu dipandang karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, pangan, dan papan.

Jadi secara umum kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seorang anggota masyarakat tidak dapat mempertahankan taraf kehidupan kelompok dan tidak dapat memanfaatkan kekuatan mental dan fisik mereka dalam kelompok tersebut Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu budaya miskin dan miskin budaya. Miskin Budaya adalah budaya di mana seseorang tidak memiliki pengetahuan atau kreativitas yang cukup, sehingga mereka tidak mampu melakukan sesuatu yang lebih baik dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar mereka. Adapun budaya miskin adalah budaya malas, orang yang etos kerjanya sangat rendah meskipun mereka mempunyai kemampuan, pengetahuan yang memadai dan juga memiliki daya kreatifitas.

2. Kejahatan atau Kriminalitas

Kejahatan berhubungan dengan suatu organisasi yang hidup dalam masyarakat. Biasanya seseorang melakukan kejahatan dikarenakan adanya kekecewaan, merupakan bentuk kompensasi, dapat juga ditimbulkan oleh golongan yang

menganggap dirinya kebal terhadap hukum dan sarana-sarana pengendalian sosial lainnya, selain itu juga situasi sosial yang memberikan peluang atau kesempatan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan.

3. Disorganisasi Keluarga

Adapun yang dimaksud dengan disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai satu unit karena anggota keluarga gagal dalam memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya. Bentuk-bentuk disorganisasi keluarga antara lain sebagai berikut:

- a. Unit keluarga tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan.
- b. Perceraian.
- c. Tidak ada komunikasi yang baik diantara anggota keluarga.
- d. Krisis keluarga yang disebabkan faktor intern dan ekstern.

4. Peperangan

Masalah peperangan berbeda dengan masalah sosial lainnya, di karenakan menyangkut beberapa masyarakat sekaligus, sehingga merupakan masalah yang paling sulit dipecahkan. Peperangan mengakibatkan disorganisasi dalam berbagai aspek kemasyarakatan baik bagi negara yang dapat memenangkan perang ataupun bagi negara yang kalah perang.

5. Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat

Bentuk masalah sosial yang disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat dapat berupa:

- a. Pelacuran, berpengaruh besar terhadap moral seseorang
- b. Delinkuensi anak-anak merupakan kelompok anak-anak muda yang tergabung dalam suatu organisasi baik formal maupun non formal yang mempunyai tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya.
- c. Alkoholisme, akibat dari alkoholisme yaitu kurangnya kemampuan untuk mengendalikan diri baik secara fisik, psikologis, maupun sosial sehingga tindakannya akan mengganggu ketenteraman masyarakat secara umum.

6. Masalah Kependudukan

Masalah kependudukan merupakan masalah dasar terjadinya masalah-masalah sosial yang lain. Artinya masalah kependudukan menjadi pendorong timbulnya masalah-masalah sosial yang lain. Pertumbuhan penduduk akan diikuti oleh pertumbuhan kebutuhan hidupnya. Apabila kebutuhan hidup itu tidak terpenuhi akan mengakibatkan terjadinya berbagai ketimpangan, misalnya dalam bidang ekonomi, ekologi atau lingkungan, pendidikan dan sebagainya.

7. Masalah Lingkungan

Secara umum, masalah lingkungan dapat diartikan sebagai masalah yang terjadi dalam lingkungan hidup manusia. Masalah lingkungan ini tidak bisa berdiri sendiri artinya masalah ini terkait dengan masalah-masalah yang lain, seperti masalah kependudukan, misalnya tingginya arus urbanisasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya. Selain itu juga terkait dengan perkembangan IPTEK (Budyanti, 2022:44).

2.4.4 Komponen-Komponen Masalah Sosial

Menurut Parillo (1987:14) dalam buku Soetomo menyatakan:

Masalah sosial mengandung empat komponen, dengan demikian suatu situasi atau kondisi sosial dapat disebut sebagai masalah sosial apabila terlihat indikasi keberadaan empat unsur tadi (Soetomo, 2015:6).

Komponen-komponen yang terdapat dalam masalah sosial adalah sebagai berikut:

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.
2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kegiatan fisik atau nonfisik, baik pada individu maupun masyarakat.
3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan (Soetomo, 2015:6).

2.4.5 Karakteristik Masalah Sosial

Masalah sosial dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang di rasakan banyak orang sebagai sesuatu yang tidak diharapkan serta menuntut aksi sosial secara kolektif. Adapun karakteristik masalah sosial menurut Suharto adalah sebagai berikut:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang

Suatu masalah baru dapat diartikan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika

suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial.

2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan

Menurut paham hedonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran "baik" atau "buruk" sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat.

3. Kondisi yang menuntut pemecahan

Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan jika seseorang merasa lapar akan segera dicarinya rumah makan. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.

4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara perseorangan atau satu persatu tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial (*social engineering*) seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang (Soeharto, 2013:71–72).

2.4.6 Pemecahan Masalah Sosial

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun swasta untuk upaya pemecahan masalah sosial. Tidak hanya pemangku kepentingan saja yang mengupayakan pemecahan masalah, tetapi masyarakat sebagai subjek utama harus ikut serta dalam mengatasi dan membantu pemecahan masalah sosial, terutama pada lingkungan sosialnya.

Tindakan penanganan oleh masyarakat merupakan tindakan yang terstruktur dan melembaga, dan hal tersebut merupakan bagian pola dari kehidupan sosialnya. Masalah sosial secara umum merupakan salah satu bentuk realitas sosial yang dapat menimbulkan penderitaan, Upaya untuk mengatasi masalah dan penderitaan itu datang dari masyarakat melalui cara bagaimana mereka bisa mengembangkan dirinya (Soetomo, 2015:255–256).

Respons masyarakat terhadap penanganan masalah sosial pada umumnya merupakan tindakan bersama yang diharapkan berdampak pada kondisi yang lebih baik nantinya. Secara umum dapat dikatakan, bahwa masyarakat yang dapat mengelola dan mengatasi masalah sosial, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang lain, sedangkan sebaliknya ketidakmampuan masyarakat untuk menanganidan memecahkan masalah sosial yang dihadapi dapat melahirkan kondisi *social illfare* atau sebagai lawan kata dari *social welfare* (Soetomo, 2015, p. 259).

Tugas utama seorang pekerja sosial dalam pemecahan masalah sosial yaitu memberikan pelayanan-pelayanan sosial yang baik kepada individu, kelompok dan juga masyarakat yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan nilai-nilai

pekerjaan sosial. Hal tersebut inilah yang menjadi tantangan bagi para pekerja sosial untuk menunjukkan kemampuan dan keprofesionalanya terhadap masyarakat. Harapannya masyarakat dapat mampu menjalankan peran sosialnya di lingkunganya.

2.5 Konsep Partisipasi

2.5.1 Definisi Partisipasi

Partisipasi merupakan keikutsertaan warga masyarakat atau individu dalam suatu kegiatan atau program yang di laksanakan di suatu wilayah tempat mereka berada, partisipasi menurut Sulaiman (1985:6) yang dikutip oleh Huraerah menyebutkan bahwa

partisipasi sosial merupakan keterlibatan aktif warga masyarakat secara perorangan, kelompok, atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam dan atau di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosialnya (Abu Huraerah, 2008:110).

Pengertian partisipasi menurut definisi di atas merupakan keterlibatan warga masyarakat baik perorangan atau kelompok dalam mengikuti suatu program dari proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, serta sampai pelaksanaan program secara sukarela untuk mencapai tujuan pembangunan sosial agar dapat menjadi lebih baik, selain itu juga partisipasi masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan, sebagaimana disebutkan oleh Ndraha (1987:1) yaitu:

1. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai satu di antara titik awal perubahan sosial.

2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya).
3. Partisipasi dalam perencanaan Pembangunan, termasuk pengambilan Keputusan (penetapan rencana).
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional Pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil Pembangunan (*participation in benefit*).
6. Partisipasi dalam menilai hasil Pembangunan (Abu Huraerah, 2008:110).

Kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi dimulai dengan melakukan kontak dengan pihak lain, memperhatikan atau menyerap dan juga memberi tanggapan informasi dan menerimanya. Partisipasi juga bisa dilakukan dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan.

2.5.2 Pengelompokan Partisipasi Masyarakat

Terdapat tiga pengelompokan partisipasi masyarakat yang dikaitkan juga dengan praktik pembangunan masyarakat yang dikemukakan oleh Gaventa dan Valderama yaitu:

1. Partisipasi politik: representasi dalam demokrasi. Tujuannya untuk memengaruhi dan mendudukkan wakil rakyat dalam suatu Lembaga pemerintahan dari pada melibatkan secara langsung masyarakat dalam proses-proses pemerintahan.
2. Partisipasi sosial: keterlibatan masyarakat dalam melakukan proses Pembangunan. Masyarakat dipandang sebagai '*beneficiary*' pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan suatu keputusan dalam semua tahapan

siklus proyek Pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi program, oleh sebab itu partisipasi diletakan di luar lembaga formal pemerintahan seperti forum warga.

3. Partisipasi warga: pengambilan langsung dalam kebijakan publik. Warga berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan suatu keputusan pada lembaga dan juga proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebaga penerima (objek), tetapi juga subjek dari suatu kegiatan Pembangunan yang sedang dilakukan (Abu Huraerah, 2008:113).

Pengertian diatas menjelaskan bahwa partisipasi dibagi menjadi tiga kelompok yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, partispasi warga, pentingnya partisipasi dalam suatu program dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan agar tercapainya suatu pembangunan,

2.5.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi dalam perkembangan memiliki makna yang luas dan memiliki arti yang berberda-beda, bahkan apapun yang disebut “Partisipasi”, oleh sebab itu untuk memudahkan memaknainya dapat digunakan tingkatan partisipasi. Terdapat tiga tingkatan partisipasi menurut Hoofsteede yaitu:

1. Partisipasi inisiasi (*initiation participation*), yaitu partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, atau dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang merupakan kebutuhan bagi masyarakat.
2. Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*), yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.

3. Partisipasi eksekusi (*execution participation*), yaitu partisipasi pada tingkat pelaksanaan. Masyarakat tidak hanya sekedar menjadi objek pembangunan saja, tetapi bisa menentukan dan mengusulkan segala sesuatu yang akan direncanakan (Abu Huraerah, 2008:115).

Penjelasan diatas bahwa partisipasi merupakan sebuah usaha yang melibatkan keikutsertaan individu, kelompok dan juga masyarakat untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas guna kepentingan bersama, adapun partisipasi dapat dimulai dari inisiasi atau inisiatif dari seseorang dengan melihat kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, lalu inisiatif tersebut menjadi pembicaraan untuk membuat suatu kegiatan ataupun proyek, setelah partisipasi legitimasi maka selanjutnya adalah proses pelaksanaan, yang di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek proyek atau pembangunan, masyarakat bisa menentukan dan mengusulkan segala sesuatu yang direncanakan disesuaikan dengan kebutuhan.

2.5.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi yang dimaksud merupakan macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok, atau masyarakat yang berpartisipasi. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Hamijoyo dan Iskandar memperinci jenis-jenis partisipasi yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembanguna desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.

4. Partispasi keterampilan dan Kemahiran, yang diberikan orang untuk menodorong aneka ragam bentuk usaha dan industry.
5. Partispasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), *nyambungan*, *mulang sambung* (Abu Huraerah, 2008: 116).

Selain itu juga Sulaiman membagi bentuk-bentuk partisipasi sosial ke dalam lima macam yaitu:

1. Partispasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partispasi dalam bentuk iutan uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana, dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
3. Partispasi dalam bentuk dukungan
4. Partispasi dalam proses pengembalian leputusan.
5. Partispasi *representatif* dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia (Abu Huraerah, 2008: 117).

Dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas tidak ada perbedaan yang mencolok, keduanya berpendapat dengan maksud yang sama, maksud dari pembagian bentuk partisipasi yang telah diuraikan yaitu untuk menunjukkan luasnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan orang kalau akan berpartisipasi.

2.5.5 Motif Partisipasi Masyarakat

Seseorang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu dikarenakan adanya motif-motif yang mengerakkannya, begitu juga ketika seseorang, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan karena dilandasi oleh motif-motif tertentu, menurut Billah dapat dilihat lima motif, yang masing-masing bisa bekerja sendirian maupun bekerja bersamaan, kelima motif tersebut yaitu:

a. Motif Psikologi

Kepuasan pribadi, pencapaian prestasi, atau rasa telah mencapai sesuatu (*achievement*) dapat menjadikan sebuah motivasi yang kuat bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, termasuk juga untuk berpartisipasi meskipun kegiatan atau partisipasi itu tidak akan menghasilkan keuntungan (baik berupa uang atau materi).

b. Motif Sosial

Ada dua sisi motif sosial, yakni untuk memperoleh status sosial dan untuk menghindarkan dari terkena pengendalian status sosial. Orang akan dengan senang hati berpartisipasi didalam suatu kegiatan (pembangunan) manakala keikutsertaannya itu akan membawa dampak meningkatnya status sosialnya. Pada sisi yang negatif, orang akan terpaksa berpartisipasi dalam suatu kegiatan (pembangunan) karena takut terkena sanksi sosial (tersisih atau dikucilkan oleh warga masyarakat).

c. Motif Ekonomi

Laba merupakan motif ekonomi dan juga dapat efektif dalam mendorong seseorang mengambil keputusan untuk ikut berpartisipasi didalam kegiatan (pembangunan). Pengambilan keputusan yang bersifat ekonomis dapat mengambil dua bentuk strategi, yaitu maksimum profit dan minimum profit. Dengan menggunakan tata nalar ekonomi, masyarakat akan memutuskan untuk berpartisipasi jika akan mendapatkan keuntungan. Setidaknya ia tidak akan rugi jika berpartisipasi atau paling tidak kerugian yang diperoleh dari partisipasi akan lebih kecil daripada kerugian karena tidak ikut berpartisipasi. Dasar utama motif politik adalah kekuasaan. Oleh karena itu, partisipasi seseorang atau golongan akan ditentukan oleh besar kecilnya kekuasaan yang dapat diperoleh dari partisipasinya didalam berbagai kegiatan (pembangunan) (Abu Huraerah, 2008: 119–120).

Hal tersebut merupakan motif seseorang mau berpartisipasi dalam suatu program diakrenakan adanya suatu dorngan dalam dirinya sendiri seperti motif psikologi, motif sosial, dan juga motif ekonomi, yang menjadikan seseorang, kelompok, atau masyarakat terpacu untuk melakukan partisipasi di suatu kegiatan atau program.

2.5.6 Keberhasilan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan partisipasi masyarakat dapat di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang disebutkan oleh Najib yaitu:

- a. Siapakah peneggas partisipasi: apakah pemerintah pusat, peminrintah daerah atau LSM

- b. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan: apakah untuk pemerintah atau untuk masyarakat. Jika untuk kepentingan warga maka program kemiskinan dengan pendekatan partisipasi masyarakat akan lebih berlanjut.
- c. Siapa yang memegang kendali: apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Lembaga donor, jika pemerintah daerah atau LSM yang memegang kendali cenderung lebih berhasil, karena pemerintah daerah atau LSM cenderung lebih mengetahui permasalahan, kondisi, dan kebutuhan daerah atau masyarakat dibanding pihak luar.
- d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat: apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahannya, jika hubungan ini baik, partisipasi akan lebih mudah dilaksanakan.
- e. Kultural: daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi cenderung lebih mudah dan berlanjut.
- f. Politik: pemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keberagaman dan demokratis.
- g. Legalitas: tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan Pembangunan.
- h. Ekonomi: adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh “manfaat” setelah berpartisipasi
- i. Kepemimpinan: adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari kalangan pemerintah, LSM, masyarakat itu sendiri atau juga tokoh masyarakat.

- j. Waktu: penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditempatkan pada kurun waktu yang cukup lama.
- k. Tersedianya jaringan yang menghubungkan anatara warga masyarakat dan pemerintah (forum warga) (Abu Huraerah, 2008: 121–122).

Hal tersebut dapat menjadi pengaruh keberhasilan suatu program yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, oleh sebab itu perlunya dorongan dari berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, warga masyarakat itu sendiri yang mengetahui kondisi dilingkunganya untuk mencapai keberhasilan dalam berpartisipasi.

2.6 Tinjauan Ibu Rumah Tangga

2.6.1 Definisi Ibu Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) ibu rumah tangga dapat diartikan sebagai seorang Wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga (tidak bekerja di kantor), Selain itu juga ibu rumah tangga merupakan wanita yang banyak menghabiskan waktunya dirumah dan mempersembahkan waktunya tersebut untuk mengasuh dan juga mengurus anaknya menurut pola asuh yang di berikan masyarakat umum (Junaidi, 2017).

Menurut Effendy menyebutkan juga bahwa ibu rumah tangga adalah sosok ibu yang berperan dalam:

1. Mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, dan kegiatan domestik lainnya.
2. Mengasuh dan mendidik anak-anaknya sebagai satu kelompok dan peranan sosial

3. Memenuhi kebutuhan efektif dan sosial anak-anaknya.
4. Menjadi anggota masyarakat yang aktif dan harmonis dilingkungannya yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti PKK, arisan, majelis taklim (Junaidi, 2017).

Uraian di atas menjelaskan bahwa ibu rumah tangga berperan penting dalam mengurus rumah tangga dan memiliki banyak tugas seperti, mengurus anak-anaknya, memasak, menyuci, menyapu, dan juga kegiatan domestik lainnya, dari kegiatan tersebut secara tidak langsung menghasilkan limbah yang di sebut sampah rumah tangga, seperti sampah jajanan anak, sampah dapur, dan sampah rumah tangga lainnya yang dapat di daur ulang, oleh sebab itu pentingnya mengelola sampah dari hulu atau sumber.

Pentingnya mengelola sampah dari hulu untu mengurangi tingkat populasi sampah, agar masyarakat dapat hidup bersih, sehat, dan juga tenang, mengelola sampah dapat berakibat baik bagi masyrakat seperti meminimalisir terjadinya banjir yang diakibatkan tersumbatnya gorong-gorong air oleh sampah, selain itu juga dengan mengelola sampah dari hulu dapat mengubah pola pikir masyarakat agar masyrakat lebih peduli lagi terhadap lingkungan seperti tidak membuang sampah ke aliran Sungai.